

***HISTORY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA STATES (RIS) TO
RETURN TO THE UNITARY STATE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA (NKRI) 1949-1950***

Slamet Kabul Budiarto*, Drs. Ridwan Melay, M.Hum**, Asril, M.Pd***
Slametakbul_budiarto@yahoo.com, ridwanmelay@yahoo.com, asril.unri@gmail.com
CP : 082387559065

*History Education Studies Program
Faculty of Teacher Training and Education
University of Riau*

Abstract : *After the proclamation, the Dutch returned to Indonesia by piggybacking on allied forces. The Netherlands intends to re-colonize Indonesia by means other political. The implementation of the Round Table Conference officially mark the founding of the Republic of Indonesia states (RIS) that on December 27, 1949. The purpose of this study were (1) To know the events behind the founding of the Republic of Indonesia States (RIS) (2) To know the condition of government of the Republic of Indonesia states (RIS) (3) To know the end of the Republic of Indonesia states (RIS) to return to the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). In this study using methods of historical research. Results from this study is there are some events and happenings behind the founding of the Republic of Indonesia states (RIS) as the Malino Conference, Linggajati, Renville Agreement, Roem-Royen, Inter-Indonesia Conference and the Round Table Conference. At the time of the founding of the Republic of Indonesia States (RIS) so much chaos and upheaval that resulted in the failure of RIS, such as political uprising conducted by Westerling, Andi Azis, and Soumokil. In the economic sector, Indonesia must bear the burden of paying the debt the Dutch East Indies. In the field of military, TNI and the former Colonial Army troops joined the Armed Forces RIS (APRIS). In the field of culture, Indonesia and the Netherlands agreed to establish cooperation such as the exchange of teaching staff and maintenance along cultural objects. In the social field, Indonesia received and ensure employees of Dutch citizen to remain in Indonesia. People of Indonesia considers that the RIS government failed to run the government, so that arose turmoil in various regions carried out by people who are not satisfied and asked back to the Unitary State. Finally, RIS and RI government talks to discuss the re-establishment of the Unitary State. On August 17, 1950 set back the establishment of the unitary state of the Republic of Indonesia (NKRI) with the constitution Constitution Temporary (Provisional Constitution).*

Key Words: History, RIS, NKRI

SEJARAH BERDIRINYA NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS) SAMPAI KEMBALI KE NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) 1949-1950

Slamet Kabul Budiarto*, Drs. Ridwan Melay, M.Hum**, Asril, M.Pd***
Slametskabul_budiarto@yahoo.com, ridwanmelay@yahoo.com, asril.unri@gmail.com
CP : 082387559065

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak : Setelah proklamasi, Belanda kembali datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu. Belanda berniat kembali menjajah Indonesia dengan cara politik lain. Terselenggaranya Konferensi Meja Bundar menandai secara resmi berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yakni pada tanggal 27 Desember 1949. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) (2) Untuk mengetahui kondisi berjalannya pemerintahan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) (3) Untuk mengetahui berakhirnya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) sampai Kembali Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Hasil dari penelitian ini adalah ada beberapa peristiwa dan kejadian yang melatarbelakangi berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) seperti Konferensi Malino, Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem-Royen, Konferensi Inter-Indonesia dan Konferensi Meja Bundar. Pada masa berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) begitu banyak kekacauan maupun pergolakan yang menyebabkan kemunduran RIS, seperti di bidang politik terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Westerling, Andi Azis, dan Soumokil. Di bidang ekonomi, Indonesia harus membayar hutang Hindia Belanda. Di bidang Militer, TNI dan bekas pasukan KNIL bergabung menjadi Angkatan Perang RIS (APRIS). Di bidang kebudayaan, Indonesia dan Belanda bersepakat menjalin kerjasama seperti penukaran tenaga pengajar dan pemeliharaan bersama benda-benda budaya. Di bidang sosial, Indonesia menerima dan menjamin pegawai-pegawai yang berkewarganegaraan Belanda untuk tetap bekerja di Indonesia. Rakyat Indonesia menganggap bahwa pemerintah RIS gagal dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga diberbagai daerah timbul pergolakan-pergolakan yang dilakukan oleh rakyat yang merasa tidak puas dan menuntut kembali menjadi Negara Kesatuan. Akhirnya pemerintah RIS dan RI berunding membahas pembentukan kembali Negara Kesatuan. Pada tanggal 17 Agustus 1950 ditetapkan kembali berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS).

Kata Kunci : Sejarah, RIS, NKRI

PENDAHULUAN

Proklamasi kemerdekaan ialah suatu alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan yang meliputi bangsa, tanah air, pemerintahan, dan kebahagiaan rakyat.¹ Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ternyata bangsa Indonesia masih menghadapi kekuatan sekutu yang berupaya untuk menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintah NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Selain itu Belanda secara licik mempropagandakan kepada dunia luar bahwa negara Proklamasi R.I. hadiah Fasis Jepang.² Belanda kembali datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu (AFNEI). Rakyat Indonesia yang awalnya menyambut baik kedatangan tentara sekutu kini menjadi khawatir dengan kedatangan tentara Belanda. Belanda berniat kembali menjajah Indonesia, namun Belanda paham bahwa tidak mungkin lagi menjajah seperti cara dahulu. Belanda pun akhirnya menggunakan cara politik barunya yaitu dengan mendirikan negara-negara boneka. Kekhawatiran rakyat Indonesia karena kedatangan Belanda akhirnya pun menjadi kenyataan. Rakyat Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaan tidak menghendaki kembalinya tentara Belanda di Indonesia. Terjadi beberapa pertempuran antara rakyat Indonesia dengan Belanda diberbagai daerah di Indonesia yang disinggahi oleh tentara Belanda. Para pemimpin Indonesia dan Belanda pun bersedia berunding untuk mengakhiri konflik tersebut, maka terlaksanalah Perundingan Linggarjati. Pada tanggal 20 Juli 1947 Belanda secara sepihak melancarkan agresi militer I. Perundingan tersebut terlaksana di sebuah kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville, maka tercapailah sebuah perjanjian yang disebut Perjanjian Renville. Pada tanggal 18 Desember 1948 Belanda kembali melancarkan agresi militer II. Indonesia dan Belanda pun kembali berundingan, perundingan ini dinamakan Perundingan Roem-Royen. Kini Indonesia mempersiapkan segala keperluan menjelang dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar. Hingga pada akhirnya pada tanggal 23 Agustus – 2 September 1949 dilaksanakanlah Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Hasil-hasil dari Konferensi Meja Bundar telah disepakati oleh Indonesia dan Belanda, serta Belanda pun mengakui kedaulatan Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949 secara resmi berdirilah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Istilah sejarah berasal dari kata Arab "Syajarah" yang berarti pohon, akar, keturunan dan asal-usul. Kata sejarah masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia sejak terjadinya akulturasi kebudayaan Indonesia dan kebudayaan islam pada abad XIII. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi modern sejarah mempunyai kedudukan dan arti khusus sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan.³ Sejarah membicarakan segala sesuatu yang dialami manusia. Dengan itu maka kepada sejarah diberikan lapangan tidak terbatas dengan bahan-bahan yang tidak terhingga pula. Terhadap istilah ilmu sejarah batas itu telah ditentukan, yaitu yang mengenai manusia. Lengkapnya, menentukan dan mewariskan aneka warna tentang masyarakat manusia yang ingin diketahui. Dengan demikian, ilmu sejarah membatasi dirinya pada hal-hal yang berhubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial. Yang tidak mengenai masa

¹ Sudirman, Adi. 2014. *Sejarah Lengkap Indonesia*. hal. 302

² Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. hal. 49

³ Hugiono dan Poerwantana, P.K. 1992. *Pengantar Ilmu Sejarah*. hal. 3

lalu masyarakat manusia, termasuk ilmu lain. Sejarah tidak hanya mencatat kejadian yang telah merupakan fakta warisan masa lalu, tetapi juga menguraikan hubungan antara rentetan peristiwa yang telah terjadi. Jadi lukisan sejarah itu merupakan gambaran lengkap, yang terdiri dari fakta-fakta kejadian yang telah berlalu dijalin dengan tafsiran dan penjelasan atau ulasan dari kenyataan-kenyataan itu. Diceritakan saling-hubungan dan kausalitas antara fakta sehingga membentuk gambaran yang dapat dipahami. Kalau hanya diberitakan fakta-fakta saja, itu dianggap pseudo sejarah. Baru ia menjadi sejarah kalau dalam urutan peristiwa dengan jalinan tafsiran dan penjelasan tercipta gambaran atau pandangan tertentu, yang memberikan pengertian tentang masa lalu. Sejarah laksana cermin, yang memantulkan gambaran masyarakat tertentu sedemikian rupa, hingga orang mengerti tentang masa lalu masyarakat itu dan paham akan masa kininya. Dengan uraian pengertian di atas, definisi sejarah dapat dirumuskan sebagai berikut: "Sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial, yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan, yang memberi pengertian tentang apa yang telah berlalu itu".⁴

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Sejarah Berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) Sampai Kembali Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1949-1950. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), untuk mengetahui kondisi berjalannya pemerintahan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), untuk mengetahui berakhirnya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) sampai kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kepustakaan yaitu Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memahami buku-buku, artikel-artikel, arsip dan dokumen-dokumen yang relevan. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan pengumpulan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan bukti-bukti nyata sumber-sumber yang diperoleh guna mengetahui kenyataan dari suatu peristiwa tersebut. Misalnya lukisan/gambar.

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah metode sejarah. Metode historis/sejarah adalah upaya mengungkap/mengkaji arti dan hubungan kehidupan umat manusia berdasarkan dokumen ilmiah yang dihasilkan oleh pendahulunya atau dokumen sejarah.⁵ Metode sejarah bertumpu pada empat langkah kegiatan yaitu Heuristik, Verifikasi, Interpretasi dan Historiografi.

⁴ Gazalba, Sidi. 1981. *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. hal. 12

⁵ Suharto dkk. 2004. *Perekayasaannya Metodologi Penelitian*. hal. 99

PEMBAHASAN

A. Berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)

Belanda kembali datang ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu. Tentu hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi bangsa Indonesia. RIS secara resmi terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949 pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Adapun peristiwa-peristiwa tersebut penulis jabarkan pada pembahasan dibawah ini.

1. Konferensi Malino

Konferensi Malino merupakan perundingan antara Belanda dan tokoh rakyat ujung pandang. Konferensi ini diprakarsai oleh van Mook yang ingin mendirikan Negara-negara boneka. Konferensi Malino melahirkan berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT).

Tanggal 16 Juli 1946-25 Juli 1946 dilaksanakan Konferensi Malino yang melahirkan Negara yang pertama yaitu Negara Indonesia Timur (NIT).⁶ Hasil konferensi Malino, seperti dituangkan dalam resolusi adalah:⁷

1. *Menuju untuk suatu peraturan federatis Indonesia, seluruh Indonesia, dengan nama: Perserikatan Negeri-negeri Indonesia.*
2. *Membagi federasi ini dalam empat bagian: Jawa, Andalas, Kalimantan dan Timur Besar, Kepulauan Sunda Kecil, Kalimantan Timur pada Kalimantan, Bangka, Biliton dan penggabungan pada Andalas.*
3. *Mengadakan segala rapat dari konferensi kedua untuk penyelenggaraan dan mengerjakan usul untuk perubahan tata Negara Kalimantan dan Timur Besar.*
4. *Persetujuan dengan usul supaya tujuh wakil Indonesia dan Malino mendapat tempat untuk persiapan dari perubahan tata Negara Kalimantan, Timur Besar, Bangka, Biliton dan Riau.*

2. Perjanjian Linggarjati

Pergolakan dan pertempuran antara Indonesia dan Belanda telah terjadi diberbagai daerah-daerah di Indonesia. Pihak Indonesia dan Belanda pun bersedia berunding untuk menyelesaikan konflik ini. Perundingan ini dapat

⁶ Kansil, C.S.T. 1994. *Latihan Ujian Hukum Tata Negara*. hal. 212

⁷ Hoesein, Rushdy. 2010. *Terobosan Soekarno Dalam Perundingan Linggarjati*. hal. 152

terlaksana dengan nama Perjanjian Linggarjati. Isi pokok perjanjian Linggarjati ialah:⁸

1. *Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa dan Madura.*
2. *Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, yang salah satu Negara bagiannya adalah Republik Indonesia.*
3. *Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya.*

3. Perjanjian Renville

Agresi Militer I yang dilancarkan oleh Belanda mendapat kecaman dari dunia luar. Perundingan tersebut terlaksana pada tanggal 17 Januari 1948 di sebuah kapal perang Amerika Serikat bernama USS Renville yang kemudian disebut sebagai Perjanjian Renville. Isi perjanjian Renville ialah:⁹

1. *Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat.*
2. *Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia-Belanda.*
3. *Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara.*
4. *Republik Indonesia menjadi Negara bagian dari RIS.*
5. *Antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk konstituante RIS.*
6. *Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda (daerah kantong) harus dipindahkan ke daerah RI.*

4. Perundingan Roem-Royen

Belanda beranggapan bahwa RI tidak bisa menjaga kestabilan dan keamanan wilayahnya. Dengan kondisi politik RI yang tengah mengalami pergolakan, situasi tersebut dimanfaatkan Belanda untuk melancarkan Agresi Militernya yang kedua. Kedua belah pihak pun akhirnya bersedia untuk mengakhiri konflik dan melaksanakan perundingan, perundingan ini dinamakan Perundingan Roem-Royen dari tanggal 14 April – 7 Mei 1949 di Jakarta.

⁸ Arta, Ketut Sedana dan Margi, I Ketut. 2014. *Sejarah Indonesia; dari Proklamasi Sampai Orde Reformasi*. hal. 98

⁹ Daradjadi. 2014. *Mr. Sartono Pejuang Demokrasi dan Bapak Parlemen Indonesia*. hal. 144

Pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan segitiga antara RI, BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) dan Belanda dibawah pengawasan komisi PBB yang dipimpin oleh Christchley. Perundingan itu menghasilkan tiga keputusan yaitu:¹⁰

- 1. Pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 1949.*
- 2. Perintah penghentian perang gerilya akan diberikan setelah pemerintahan RI berada di Yogyakarta pada tanggal 1 Juni 1949.*
- 3. KMB akan dilaksanakan di Den Haag.*

5. Konferensi Inter-Indonesia

Konferensi Inter-Indonesia merupakan konferensi yang berlangsung antara Negara RI dengan Negara-negara boneka atau Negara bagian bentukan Belanda yang tergabung dalam BFO. Pada awalnya pembentukan BFO ini diharapkan oleh Belanda akan mempermudah Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Namun tidak demikian, sikap-sikap Negara-negara yang tergabung dalam BFO berubah setelah Belanda melancarkan Agresi Militer terhadap Indonesia.

Konferensi Inter-Indonesia berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 19-22 Juli 1949 yang dipimpin oleh wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta. Konferensi ini banyak didominasi perbincangan mengenai konsep dan teknis pembentukan RIS, terutama mengenai susunan kenegaraan berikut hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hasil kesepakatan dari konferensi Inter-Indonesia adalah:¹¹

- 1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme (serikat).*
- 2. RIS akan dikepalai oleh seorang Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden.*
- 3. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan, baik dari RI maupun dari Kerajaan Belanda.*
- 4. Angkatan perang RIS adalah angkatan perang nasional dan Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS.*
- 5. Pembentukan angkatan perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. Angkatan perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah RIS dengan inti dari TNI dan KNIL serta kesatuan-kesatuan Belanda lainnya. Sidang kedua konferensi Inter-Indonesia diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli dengan keputusan:*
 - 1) Bendera RIS adalah Sang Merah Putih.*
 - 2) Lagu kebangsaan Indonesia Raya.*

¹⁰ Arta, Ketut Sedana dan Margi, I Ketut, *op. cit.* hal. 105

¹¹ *Ibid.*, hal. 107

- 3) *Bahasa resmi RIS adalah bahasa Indonesia.*
- 4) *Presiden RIS dipilih oleh RI dan BFO.*

6. Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus – 2 September 1949 di kota Den Haag, Belanda. Perwakilan RI dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, perwakilan BFO dipimpin Sultan Hamid sedangkan perwakilan Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen. Hasil-hasil KMB ialah:¹²

1. *Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS.*
2. *Penyerahan kedaulatan itu akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.*
3. *Tentang Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS.*
4. *Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda, yang akan dikepalai oleh Ratu Belanda.*
5. *Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan, bahwa beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.*
6. *Tentara Kerajaan Belanda akan secepat mungkin ditarik mundur dari Indonesia, sedangkan tentara Kerajaan Hindia-Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan, bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan-kesatuan TNI.*

berdasarkan hasil-hasil KMB di Den Haag, maka terbentuklah Negara RIS. Perundingan tersebut berjalan dari tanggal 25 September – 2 November 1949, dengan hasil ialah bahwa Kerajaan Belanda akan mengakui kedaulatan atas Indonesia kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Maka dalam hal ini kedudukan RI nantinya hanya akan menjadi Negara Bagian RIS.

B. Proses Berjalannya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)

Republik Indonesia Serikat (RIS) menyepakati hasil-hasil Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag. RIS dipimpin oleh seorang Presiden yaitu Soekarno dan sebagai Perdana Menteri ialah Mohammad Hatta. RIS mempunyai Undang-Undang yakni Konstitusi RIS. Sementara itu Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku pada negara Republik Indonesia yang statusnya hanya sebagai negara bagian RIS.

¹² *Ibid.*, hal. 108

*Negara-negara bagian dari Republik Indonesia Serikat ialah:*¹³

1. *Negara Republik Indonesia (dengan daerah statusquo Renville).*
2. *Negara Indonesia Timur.*
3. *Negara Pasundan, termasuk distrik federal Jakarta.*
4. *Negara Jawa Timur.*
5. *Negara Madura.*
6. *Negara Sumatra Timur, dengan pengertian bahwa statusquo Asahan Selatan dan Labuhan Baru berhubungan dengan Negara sumatra Timur tetap berlaku.*
7. *Negara Sumatra Selatan.*

Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri, yaitu Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur. Daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-bagian yaitu Swapraja kota Waringin daerah Sabang, daerah Padang yang diperintah oleh alat kelengkapan RIS.

1. Kondisi Politik dan Konstitusional RIS

Kondisi terpenting dan utama yang perlu diperhatikan oleh RIS adalah dibidang politik dan konstitusional. Setelah semua alat-alat kelengkapan RIS terbentuk, muncullah gangguan bahkan kekacauan terutama dibidang politik. Gangguan dan kekacauan ini ditimbulkan oleh beberapa pihak akibat kurang berhasilnya pemerintah RIS dalam menjalankan roda pemerintahan. Kondisi politik inilah yang menyebabkan kemunduran RIS. Gangguan politik tersebut antara lain seperti pemberontakan yang dilakukan Westerling, pemberontakan Andi Azis, pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang dipimpin oleh Soumokil dan pembebasan Irian Barat.

2. Keadaan Keuangan dan Ekonomi RIS

Perekonomian suatu Negara menjadi satu permasalahan yang sangat penting, karena untuk Negara yang baru berdiri perlu didukung oleh ekonomi yang cukup kuat. Berdirinya Negara RIS sebagai Negara berdaulat, tidak serta merta didukung secara ekonomi. Dengan hutang-hutang yang harus ditanggung oleh RIS, RIS harus segera membenahi dan menyelesaikan permasalahan ekonomi tersebut agar segera dapat memikirkan kebijakan ekonomi RIS selanjutnya.

3. Dalam sebuah Negara, militer adalah faktor terpenting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara. RIS mempunyai angkatan perang yang di sebut APRIS, yang anggotanya berisikan warga Negara Indonesia bekas tentara KNIL dan TNI yang umumnya tentara RI. Dalam Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta telah diambil kesepakatan mengenai angkatan bersenjata RIS setelah terbentuk dengan resminya RIS.¹⁴

¹³ Moedjanto, G dkk. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia*. hal. 128

¹⁴ <http://ucinkremod.blogspot.co.id> diakses 9 Agustus 2016 pukul 20:00 WIB

1. Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS.
2. Pertahanan Negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS; Negara-Negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri.
3. Angkatan Perang RIS dibentuk bersama-sama orang Indonesia yang ada dalam KNIL, ML, KM, VB dan Territorial Bataljons.
4. Pada masa permulaan RIS, Menteri Pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar Angkatan Perang RIS.

4. Keadaan Kebudayaan RIS

Pemerintah Indonesia dan Belanda bersedia membuat kesepakatan dalam bidang kebudayaan. Seperti dalam bidang pendidikan, Indonesia dan Belanda bersepakat untuk saling memberikan pengajaran dan pengetahuan untuk kemajuan masing-masing.

Antara Belanda dan RIS telah bersepakat bahwa dalam hal pengetahuan, pendidikan serta kebudayaan diadakan kerja sama dalam pembinaan dan pembangunan kebudayaan. Pemerintah Kerajaan Belanda bersedia untuk bertukar orang-orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dalam kesepakatan itu pula, tentang pemeliharaan benda-benda budaya yang dimiliki oleh pemerintah Kerajaan Belanda dan RIS secara bersama-sama.¹⁵

5. Keadaan Sosial RIS

Pada bidang sosial ini, yang dibahas adalah mengenai status kepegawaian para pegawai-pegawai yang berkewarganegaraan Belanda yang bekerja di Indonesia. Pihak Indonesia dan Belanda pun berunding untuk mencapai kesepakatan mengenai permasalahan ini.

Pemerintah RIS menerima semua pegawai sipil pemerintah Belanda. Pemerintah RIS akan menjamin tiap-tiap pegawai pemerintah yang berkebangsaan Belanda yang bekerja di Indonesia akan keselamatan dan hayat hidupnya ditanggung oleh pemerintah RIS. Selama para pegawai berkebangsaan Belanda tersebut masih menginginkan untuk bekerja di Indonesia tanpa ada paksaan dan jika berhenti itu atas kehendaknya sendiri.¹⁶

¹⁵ <http://ucinkremod.blogspot.co.id> diakses 9 Agustus 2016 pukul 20:00 WIB

¹⁶ <http://ucinkremod.blogspot.co.id> diakses 9 Agustus 2016 pukul 20:00 WIB

C. Berakhirnya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) Sampai Kembali Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Indonesia semenjak proklamasi kemerdekaan menghendaki suatu Negara kesatuan yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Pembentukan RIS dipandang sebagai hasil politik Belanda yang semata-mata untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia ini. Itulah sebabnya setelah pengakuan kedaulatan, dimana-mana di daerah-daerah bagian timbul pergolakan-pergolakan dan pernyataan-pernyataan dari rakyat untuk kembali ke Negara kesatuan dengan jalan menggabungkan diri kepada RI (Negara bagian).

Menjelang tahun 1950, Indonesia telah memiliki bentuk Negara Serikat dengan nama RIS. Kenyataan ini terpaksa diterima oleh rakyat Indonesia, sebagai suatu fase didalam perjalanan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Semenjak kelahirannya, RIS telah banyak mengandung kelemahan-kelemahan yang membuktikan bahwa pemerintah RIS tidak mampu mewujudkan aspirasi rakyat Indonesia, sehingga mendorong timbulnya keinginan untuk mengubah RIS untuk kembali menjadi Negara Kesatuan.¹⁷

1. Proses Penggabungan Negara-Negara Bagian

Peristiwa-peristiwa pergolakan yang terjadi diberbagai Negara Bagian RIS khususnya di Pulau Jawa dikarenakan rakyat sadar bahwa bentuk federal ini hanya akan dimanfaatkan saja oleh Belanda. Maka dari itu, timbullah pergolakan-pergolakan yang dilakukan oleh rakyat yang ingin menggabungkan kedalam RI dan menuntut pembubaran Negara RIS. Pergolakan yang dilakukan oleh rakyat tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, melainkan juga terjadi Pulau Kalimantan, Sumatra, Makassar, Gorontalo, Poso, Donggala, Takalar Jenepono serta di Provinsi-provinsi Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Pada akhirnya hanya tinggal ada tiga Negara bagian saja yaitu Negara RI, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur.

2. Perundingan Segitiga

Perundingan Segitiga ini sejatinya adalah untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan pergolakan yang terus terjadi di Negara Indonesia Timur (NIT). Situasi politik di NIT yang sangat tidak stabil dan cenderung mengalami kekacauan akibat pemberontakan, inilah yang menyebabkan terjadinya Perundingan Segitiga. Dalam perundingan ini juga dibahas tentang bentuk Negara yang akan dibentuknya nantinya.

Tanggal 21 April 1950 Presiden NIT, Sukawati mengeluarkan pernyataan bahwa NIT siap menjadi suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia asalkan Negara bagian RI mau bergabung menjadi satu Negaranya, namun persoalannya tidaklah semudah itu. Terbentuklah Perundingan Segitiga diketuai oleh Perdana

¹⁷ Kansil, C.S.T, *op. cit.* hal. 219

Menteri Mohammad Hatta (sebagai wakil RIS), Wakil Perdana Menteri Abdul Hakim (sebagai wakil RI), sedangkan dari NIT diwakili oleh J.H. Dokko, Manoppo, G.S.S.R. Ratulangi.¹⁸

3. Perundingan RIS – RI

Melihat kemajuan yang telah dicapai dalam perundingan segitiga antara RIS-RI-NIT. Negara Sumatra Timur (NST) juga tidak mau ketinggalan. Mereka ingin diikutsertakan dalam perundingan tersebut. Presiden Negara Indonesia Timur dan presiden Negara Sumatra Timur mempercayakan sepenuhnya kepada Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS mewakili mereka dalam perundingan dengan RI.

Tanggal 19 Mei 1950 di Jakarta diadakan pertemuan antara RIS dan RI yang dipimpin oleh Mohammad Hatta. Dalam pertemuan tersebut tercapai suatu persetujuan untuk bersama-sama membentuk Negara Kesatuan sebagai penjelmaan dari RI berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Persetujuan ini tercapai dengan suatu konsesi dari RI yaitu bahwa Negara Kesatuan itu harus dibentuk melalui RIS, bukan dengan penggabungan NST pada RI. Hal ini disetujui Perdana Menteri.¹⁹

Semua Negara/daerah-daerah bagian RIS telah menyatakan penggabungan diri dengan RI. Dalam perundingan ini membahas masalah-masalah untuk mempersiapkan pembentukan Kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempersiapkan Undang-Undang Dasar.

Atas dorongan rakyat setempat, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur mengusahakan agar pemerintah pusat RIS berunding dengan Negara bagian Republik Indonesia untuk mempersiapkan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 19 Mei 1950 tercapailah persetujuan antara RIS dan RI untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menandatangani Piagam Persetujuan pemerintah RIS dan Pemerintah RI yang menetapkan antara lain bahwa UUD Negara Kesatuan RI dapat mengubah Konstitusi RIS ditambah dengan bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS.²⁰

4. Pembentukan Kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setelah berbagai macam perundingan-perundingan telah dilakukan antara RIS dan RI, akhirnya tercapailah kesepakatan bersama untuk membentuk Negara Kesatuan. Demi tercapainya secara cepat untuk membentuk Negara Kesatuan, RI ikhlas untuk meleburkan diri kedalam RIS.

¹⁸ Arta, Ketut Sedana dan Margi, I Ketut, *op. cit.* hal. 124

¹⁹ *Ibid.*, hal. 125

²⁰ Kansil, C.S.T, *op. cit.* hal. 220

Panitia bersama ini diketuai oleh Prof. Soepomo dan sebagai acuan kerja digunakan salah satu ketentuan yang tercantum dalam Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan RI tertanggal 19 Mei 1950 yang antara lain berbunyi:²¹

1. UUD Negara Kesatuan dapat dengan mudah mengubah konstitusi RIS sedemikian rupa, sehingga essensi UUD RI antara lain: Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 33. Ditambahkan dengan bagian-bagian yang baik dari konstitusi RIS yang termasuk didalamnya.
2. Di UUDS Negara Kesatuan diadakan pasal yang memuat pokok pemikiran “hak milik itu adalah suatu fungsi sosial”.
3. Selanjutnya diadakan perubahan-perubahan dalam konstitusi sementara, antara lain:
 - a. Senat dihapus.
 - b. DPR sementara terdiri atas gabungan DPR RIS dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat.
 - c. DPR sementara bersama KNIP dinamakan Majelis Perubahan UUD, mempunyai hak mengadakan perubahan-perubahan dalam UUD baru.
 - d. Konstituante terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dengan mengadakan pemilihan umum.
 - e. Presiden ialah Presiden Soekarno.
 - f. Dewan Menteri harus bersifat Kabinet Parlementer.
 - g. Tentang jabatan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan
4. Sebelum diadakan perundang-undangan Kesatuan, maka UU dan peraturan-peraturan yang ada tetap berlaku, akan tetapi dimana mungkin diusahakan supaya perundang-undangan RI berlaku.
5. Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan.

Persetujuan yang telah disepakati dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terpilihlah kembali Soekarno sebagai Presiden NKRI dan Wakil Presiden dipilihlah Mohammad Hatta. Dan UUDS secara resmi telah disetujui dan disepakati oleh pihak-pihak yang telah melaksanakan perundingan.

*Pada tanggal 15 Agustus 1950, naskah UUDS RI ditandatangani oleh Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950 ditetapkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Konstitusi NKRI selanjutnya dikenal sebagai UUD Sementara RI tahun 1950 disingkat UUDS 1950.*²²

²¹ Arta, Ketut Sedana dan Margi, I Ketut, *op. cit.* hal. 126

²² *Ibid.*, hal. 128

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Tanggal 16-25 Juli 1946 berlangsunglah Konferensi Malino di Ujung Pandang. Kabinet baru Belanda mengutus Schermerhorn untuk berunding dengan Indonesia, perundingan ini kemudian dikenal sebagai Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946. Akibat dari Agresi Militer I Belanda, pihak Indonesia dan Belanda melangsungkan perundingan diatas kapal perang Amerika Serikat yaitu USS Renville tanggal 8 Desember 1947 sehingga dinamakan perjanjian Renville. Agresi Militer II belanda banyak mendapat kecaman dari dunia luar, maka tanggal 17 April - 7 Mei 1949 tercapailah perundingan Roem-Royen. Tanggal 19-22 Juli 1949 berlangsunglah Konferensi Inter-Indonesia. Puncaknya pada tanggal 23 Agustus – 2 September 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda.
2. Tanggal 27 Desember 1949 Negara RIS resmi terbentuk. Dan kemudian RIS mulai membentuk kabinet. RIS yang baru terbentuk banyak dihadapkan berbagai permasalahan, seperti pemberontakan-pemberontakan, RIS juga harus menanggung hutang Hindia Belanda, permasalahan pembentukan militer serta pergolakan-pergolakan rakyat diberbagai daerah yang menyebabkan kemunduran RIS. Pergolakan-pergolakan yang dilakukan oleh rakyat adalah tidak menghendaki berdirinya Negara RIS, rakyat menghendaki suatu Negara Kesatuan. Dengan terdesak pergolakan yang dilakukan oleh rakyat, pemerintah RIS pun akhirnya mulai bersidang untuk membahas permasalahan tersebut.
3. Atas dorongan rakyat, pemerintah RIS dan RI pun mulai berunding untuk pembentukan Negara Kesatuan. Tanggal 19 Mei 1950 tercapailah persetujuan untuk membentuk Negara Kesatuan. Tanggal 14 Agustus 1950, parlemen RIS menyetujui rancangan tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 1950, UUDS RI ditandatangani oleh Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman RIS. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950 ditetapkan kembali berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saran

1. Tetap selalu menghargai pengorbanan para pahlawan bangsa yang telah berjuang untuk mendirikan Negara Indonesia dengan melanjutkan cita-cita perjuangan demi mencapai Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.
2. Diharapkan kepada semua pihak untuk terus mengupayakan dan melakukan penelitian mengenai sejarah. Dan terkhusus untuk mahasiswa sejarah diharapkan terus menggali dan menulis sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

3. Kepada setiap tenaga pendidikan khususnya guru bidang studi pendidikan sejarah dapat menjadikan potensi sejarah dalam bidang pengajaran untuk menerapkan nilai-nilai perjuangan masa lalu untuk meraih kemerdekaan kepada generasi muda untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Kepada pemerintah Indonesia untuk selalu memperhatikan nasib dan memberikan penghargaan terhadap para tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang masih hidup sampai saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arta, Ketut Sedana dan Margi, I Ketut. 2014. *Sejarah Indonesia: dari Proklamasi Sampai Orde Reformasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Daradjati. 2014. *Mr. Satono Pejuang Demokrasi dan Bapak Parlemen Indonesia*. Jakarta: Kompas

Gazalba, Sidi. 1981. *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara

Hoesein, Rushdy. 2010. *Terobosan Soekarno Dalam Perundingan Linggarjati*. Jakarta: Kompas

Hugiono dan Poerwantana, P.K. 1992. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Rineka Cipta

Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Jogjakarta: Paradigma

Kansil, C.S.T. 1994. *Latihan Ujian Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sinar Grafika

Moedjanto, G dkk. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Grasindo

Suharto dkk. 2004. *Perekayasaan Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Andi

Sudirman, Adi. 2014. *Sejarah Lengkap Indonesia*. Jogjakarta: Diva Press

Sumber Website

ucinkremod.blogspot.co.id